

KETAHANAN PANGAN INDONESIA DI TENGAH DAMPAK COVID-19

Oleh: Adhis Millia Windhy, M.Agr

Calon Widyaiswara Ahli Pertama

Penyebaran covid 19 ke Indonesia mulai terdeteksi pada awal tahun 2020 dengan bertambahnya jumlah pasien yang terjangkit corona virus membuat pemerintah akhirnya memberlakukan social distancing maupun physical distancing. Penerapan ini berakibat banyak perusahaan maupun kantor pemerintahan yang memperkerjakan pegawainya untuk bekerja dari rumah atau yang biasa disebut Work From Home (WFH). Tentu saja penerapan WFH ini akan berdampak diberbagai sektor, salah satunya sektor pertanian dalam menjaga hajat hidup bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu pangan. Ditengah gejolak covid 19 pemerintah berusaha agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga.

Menurut UU No. 18 Tahun 2002, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pangan hanya dapat diproduksi dari sektor pertanian, sehingga petani harus produktif ditengah ancaman covid 19. Petani sebagai garda terdepan pangan Indonesia diharapkan tetap mampu menghasilkan produk pertanian yang menguasai hajat hidup orang banyak, dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu Kementerian Pertanian dalam hal ini berusaha meminimalisir dampak covid 19 ini bagi pertanian dengan memperkuat ketahanan pangan kita memperhatikan pasokan produksi yang harus mencukupi, jalur distribusi dan transportasi harus lancar, kestabilan harga di pasar, dll.

Indonesia menekankan penguatan sistem pangan dalam menghadapi Covid-19 dalam pertemuan Menteri G20, dimana pandemi Covid-19 yang berpotensi dalam menghambat sistem pangan dengan terganggunya rantai pasok. Untuk itu pemerintah Indonesia menilai setiap negara perlu menjadikan upaya pemulihan dan penguatan sistem pangan sebagai prioritas utama saat ini. Menurut Menteri Pertanian ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam memperkuat sistem pangan yaitu:

1. Memprakarsai pemulihan sistem pangan global untuk menjamin produksi pangan yang tinggi, rantai pasok pangan global yang kembali normal, serta perdagangan pangan internasional tanpa hambatan dan sesuai dengan aturan WTO
2. Mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, juga meningkatkan peran sektor swasta melalui kemitraan “*public private partnership*” di bidang pangan dan pertanian
3. Meningkatkan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas, terutama kepada negara-negara yang membutuhkan, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing (Kementerian Pertanian, 2020)

Selain itu sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan gizi, ketersediaan pangan, pengelolaan harga dan daya beli (www.pertanian.go.id, 2020)

DAFTAR PUSTAKA:

Kementerian Pertanian, 2020. Indonesia Tekankan Penguatan Sistem Pangan Menghadapi Covid-19. Kementerian Pertanian (internet).

Tersedia dari: www.pertanian.go.id